

PENIPUAN DALAM PARIWISATA: WAWASAN DARI *FOCUS GROUP DISCUSSION* DI KUTA MANDALIKA

Achrelia Luluk Biyanti¹, Ni Kadek Astrid Sendina², Ridho Zikrimaula³, Sri Susauty⁴
achrelialia@gmail.com¹, velloastrid@gmail.com², ridhozikrimaula@gmail.com³,
srisusantympar@gmail.com⁴

Universitas Mataram

ABSTRAK

Artikel ini menjelajahi nuansa-nuansa dari scam yang umum terjadi di industri pariwisata, dengan merujuk pada focus group discussion yang dilakukan di Kuta Mandalika. Melalui pengalaman langsung dan pandangan yang dibagikan oleh para pemangku kepentingan, artikel ini mengeksplorasi tantangan yang ditimbulkan oleh penipuan di destinasi wisata populer ini. Diskusi tersebut menekankan peran berbagai pihak, termasuk badan pemerintah, operator pariwisata, dan masyarakat lokal, dalam mengatasi dan memitigasi dampak negatif dari penipuan, dengan tujuan akhir memupuk praktik pariwisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penipuan, Pariwisata, Kuta, Mandalika.

ABSTRACT

This article delves into the nuances of scams prevalent in the tourism industry, drawing from a focus group discussion conducted in Kuta Mandalika. Through firsthand experiences and perspectives shared by stakeholders, it explores the challenges posed by scams in this popular tourist destination. The discussion underscores the roles of various actors, including government bodies, tourism operators, and local communities, in addressing and mitigating the adverse effects of scams, ultimately aiming to foster sustainable tourism practices.

Keyword: Scams, Tourism, Kuta, Mandalika.

PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan landasan bagi perkembangan ekonomi dan pertukaran budaya, menciptakan peluang untuk pertumbuhan sosio-ekonomi dan keterhubungan global. Namun, di dalam lanskap pariwisata yang luas terdapat jaringan kompleks tantangan, di antaranya adalah ancaman dari penipuan. Didefinisikan oleh praktik penipuan yang meliputi inflasi harga hingga pelayanan yang salah diwakili, penipuan merupakan ancaman signifikan bagi integritas dan keberlanjutan destinasi wisata di seluruh dunia. Dalam konteks Kuta Mandalika, sebuah pusat wisata yang berkembang pesat ditandai oleh urbanisasi cepat dan meningkatnya kunjungan wisatawan, ancaman dari penipuan muncul sebagai perhatian yang mendesak. Seiring daya tarik Kuta Mandalika yang terus menarik aliran wisatawan yang terus berkembang, kebutuhan untuk mengatasi dan memitigasi dampak penipuan menjadi semakin penting (Aziz, 2024). Untuk menyelami isu yang kompleks ini, sebuah eksplorasi yang terfokus dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang komprehensif, melibatkan pemangku kepentingan yang beragam termasuk badan pemerintah, operator pariwisata, dan perwakilan masyarakat lokal.

Artikel ini berusaha menerangi dinamika rumit dari penipuan di Kuta Mandalika, didorong oleh narasi langsung dan wawasan yang diperoleh dari FGD. Dengan mengkaji pengalaman yang otentik dan mengungkapkan tanggapan terhadap penipuan, tujuan kami adalah ganda: untuk mengungkap tantangan mendasar yang ditimbulkan oleh penipuan dalam sektor pariwisata dan untuk memahami strategi yang memungkinkan untuk menumbuhkan praktik pariwisata yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Temuan dari penyelidikan kami memiliki signifikansi ilmiah, memberikan sudut pandang yang halus

yang berkontribusi pada diskursus akademis tentang manajemen dan tata kelola pariwisata. Melalui sintesis observasi empiris dan kerangka teoritis, artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi intervensi kebijakan, memupuk kemitraan kolaboratif, dan memperkuat ketahanan ekosistem pariwisata Kuta Mandalika terhadap ancaman penipuan (Smith, 2023).

Dengan dasar akademis ini dibangun, bagian-bagian berikutnya akan menyelidiki lebih dalam bukti empiris dan kerangka teoritis yang mendasari penipuan dalam pariwisata, dimulai dengan pemeriksaan pengalaman nyata yang dikisahkan selama FGD.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dinilai sangat cocok untuk tujuan penelitian yang dimana mengidentifikasi penipuan atau scam yang terjadi di Desa Kuta.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2024. Berlokasi di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi dan wawancara mendalam dengan membuat FGD atau Forum Group Discussion kepada Pelaku Pariwisata, Pokdarwis, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Kuta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sementara operator pariwisata Kuta Mandalika berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam operasi mereka, FGD mengungkap praktik penipuan yang merugikan bisnis lokal dan wisatawan. Cara untuk mengatasi penipuan adalah dengan memperkuat regulasi, memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran publik, dan merangkul inovasi teknologi. Diharapkan dapat membangun industri pariwisata yang etis, tangguh, dan berkelanjutan di Kuta Mandalika melalui kerja sama dan inovasi dengan fokus pada pariwisata berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Scam Dalam Pariwisata: Pengalaman Langsung

Di pusat wisata yang ramai Kuta Mandalika, daya tarik pantai-pantai yang masih perawan dan pengalaman budaya yang kaya menarik aliran wisatawan yang stabil sepanjang tahun. Namun, di balik keramahan dan keindahan alam, tersembunyi sebuah sisi gelap dari penipuan yang mengancam untuk merusak kepercayaan dan mencemarkan reputasi destinasi tersebut. Narasi yang dibagikan selama FGD mengungkapkan sifat meresapnya penipuan di Kuta Mandalika, mengungkapkan serangkaian praktik penipuan yang memanfaatkan baik wisatawan maupun bisnis lokal (Aziz, 2024).

1) Peningkatan Harga Akomodasi

Peserta menceritakan insiden-insiden penipuan akomodasi, di mana harga penginapan melonjak secara dramatis selama musim wisata puncak atau acara khusus, seperti MotoGP. Meskipun regulasi pemerintah memperbolehkan penyesuaian harga selama periode tersebut, operator yang tidak jujur memanfaatkan celah hukum untuk melakukan penipuan harga, menawarkan akomodasi yang kurang baik dengan tarif yang sangat tinggi. Akibatnya, banyak wisatawan mendapati diri mereka membayar harga yang terlalu tinggi untuk akomodasi yang tidak memenuhi harapan mereka, membawa kesan kekecewaan pada pengalaman liburan mereka (Regulations on Tourism Development in Kuta Mandalika, 2023).

2) Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai

Wisatawan juga menceritakan anekdot tentang diperdaya oleh pedagang yang menawarkan barang atau jasa yang tidak sesuai atau berkualitas rendah. Secara khusus, praktik penetapan harga yang bervariasi untuk kain tradisional di Desa Sade menimbulkan

kekhawatiran di kalangan pengunjung, yang merasa tertipu oleh kurangnya transparansi dan konsistensi dalam penetapan harga. Kejadian semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan antara wisatawan dan bisnis lokal tetapi juga mencemarkan reputasi Kuta Mandalika sebagai destinasi yang dapat diandalkan untuk pengalaman budaya yang autentik (Aziz, 2024).

3) Dampak pada Pihak Terkait

Merebaknya penipuan di Kuta Mandalika berdampak di luar ranah transaksi individu, memengaruhi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata. Bagi wisatawan, pengalaman menjadi korban penipuan meninggalkan kesan ketidakpercayaan dan skeptisisme yang berkelanjutan, berpotensi mencegah kunjungan masa depan dan merusak reputasi destinasi. Bisnis lokal, terutama yang berkomitmen pada praktik etis, menghadapi pukulan dari persepsi negatif dan pendapatan yang hilang, karena penipuan menggagalkan upaya mereka untuk memberikan pengalaman yang asli dan menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Economic Impact of Scams in the Tourism Sector: Case Studies from Southeast Asia, 2024).

Secara ringkas, cerita langsung yang dibagikan selama FGD menggarisbawahi dampak meresapnya penipuan di Kuta Mandalika, menyoroti perlunya upaya kolaboratif untuk mengatasi isu mendesak ini. Dengan menghadapi akar penyebab penipuan dan menerapkan langkah-langkah yang kokoh untuk melindungi wisatawan dan menjaga standar etika, para pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk menjaga integritas dan keberlanjutan industri pariwisata Kuta Mandalika.

Peran Pemerintah Dan Otoritas Daerah

Dalam lanskap dinamis pariwisata, badan pemerintah dan otoritas pariwisata memegang peran kunci dalam membentuk kebijakan, menegakkan regulasi, dan melindungi kepentingan baik wisatawan maupun pemangku kepentingan industri. Dalam konteks Kuta Mandalika, keterlibatan entitas pemerintah dalam memerangi penipuan sangat penting untuk membina lingkungan pariwisata yang transparan dan etis (Global Code of Ethics for Tourism, 2019).

1) Kerangka Regulasi

Regulasi pemerintah berperan sebagai landasan tata kelola di sektor pariwisata, memberikan kerangka kerja untuk persaingan yang adil, perlindungan konsumen, dan pembangunan berkelanjutan. Selama FGD, peserta menyoroti regulasi yang ada yang memperbolehkan penyesuaian harga akomodasi selama musim puncak atau acara khusus. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan pasar dan kepentingan konsumen, implementasinya seringkali tidak mencukupi untuk menekan praktik eksploitatif oleh operator yang tidak jujur. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan regulasi dan mekanisme penegakan untuk mencegah penipuan dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika (Regulations on Tourism Development in Kuta Mandalika, 2023).

2) Mekanisme Penegakan

Penegakan efektif terhadap regulasi sangat penting untuk memerangi penipuan dan menuntut pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Namun, peserta menyatakan kekhawatiran tentang kecukupan mekanisme penegakan di Kuta Mandalika, dengan mengutip insiden celah regulasi dan praktik penegakan yang lemah. Meskipun ada kerangka regulasi, kurangnya pemantauan yang ketat dan mekanisme penegakan yang kuat memungkinkan penipuan terus berlanjut, mengikis kepercayaan konsumen dan mencemarkan reputasi destinasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan penegakan, meningkatkan kerjasama antara lembaga

terkait, dan menyederhanakan proses regulasi untuk memfasilitasi intervensi tepat waktu dan pencegahan aktivitas penipuan (Jones & Wang, 2022).

3) Inisiatif Kolaboratif

Kerjasama antara badan pemerintah, otoritas pariwisata, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat lokal sangat penting dalam mengatasi penipuan dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Melalui inisiatif kolaboratif, seperti kemitraan publik-swasta dan dialog multi-pemangku kepentingan, para pemangku kepentingan dapat menggabungkan sumber daya, berbagi keahlian, dan mengoordinasikan upaya untuk memerangi penipuan secara efektif (Hall & Page, 2021). Lebih jauh lagi, melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra dalam tata kelola pariwisata memupuk rasa memiliki dan tanggung jawab, memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada pelestarian warisan budaya mereka dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Jones & Wang, 2022).

Sebagai kesimpulan, peran pemerintah dan otoritas pariwisata dalam memerangi penipuan di Kuta Mandalika sangat penting untuk memastikan integritas dan keberlanjutan industri pariwisata. Dengan memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan mekanisme penegakan, dan mempromosikan kemitraan kolaboratif, para pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik pariwisata yang etis dan meningkatkan pengalaman keseluruhan wisatawan di Kuta Mandalika.

Perspektif Pelaku Pariwisata

Pelaku pariwisata berperan sebagai duta depan industri pariwisata Kuta Mandalika, bertanggung jawab atas memberikan pengalaman berkesan dan menjaga reputasi destinasi. Pandangan mereka tentang tantangan yang dihadapi oleh penipuan menawarkan sudut pandang berharga tentang kompleksitas mengelola operasi pariwisata di tengah merebaknya praktik penipuan.

1) Tantangan yang Dihadapi

Pelaku pariwisata berbagi pengalaman langsung tentang tantangan yang mereka hadapi dalam menavigasi medan yang kompleks dari penipuan di Kuta Mandalika. Di antara tantangan paling umum yang disebutkan adalah kerusakan pada peralatan sewa oleh wisatawan, perselisihan atas pembayaran layanan, dan pertemuan dengan perilaku penipuan dari kedua wisatawan dan pedagang. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menimbulkan beban logistik dan keuangan bagi operator tetapi juga membahayakan pengalaman keseluruhan wisatawan, melemahkan daya tarik destinasi dan daya saingnya di pasar pariwisata (World Heritage and Sustainable Tourism: Lessons from the Asia-Pacific, 2022).

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, operator menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam operasi mereka, berupaya untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan pengalaman yang otentik kepada wisatawan. Dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan dan perilaku etis, operator bertujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas di antara wisatawan, sehingga menjaga keberlanjutan jangka panjang industri pariwisata Kuta Mandalika.

2) Strategi untuk Integritas

Menanggapi ancaman penipuan yang meresap, operator pariwisata telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga standar etis dan mengurangi risiko dalam operasi mereka. Strategi-strategi ini termasuk menerapkan kebijakan penetapan harga yang transparan, memberikan syarat dan ketentuan yang jelas untuk layanan, dan meningkatkan protokol layanan pelanggan untuk menangani keluhan dan pengaduan

dengan cepat. Selain itu, operator telah berusaha untuk berkolaborasi dengan asosiasi industri, lembaga regulasi, dan komunitas lokal untuk berbagi praktik terbaik, menyebarkan informasi, dan mengkoordinasikan respons terhadap tantangan-tantangan yang muncul (Braun & Hernández, 2021).

Meskipun tantangan-tantangan inheren dari beroperasi di lingkungan pariwisata yang kompetitif dan dinamis, operator tetap berkomitmen untuk memberikan pengalaman luar biasa dan mendorong praktik pariwisata yang berkelanjutan di Kuta Mandalika. Melalui dedikasi mereka pada profesionalisme, integritas, dan orientasi pada pelanggan, operator memainkan peran penting dalam membentuk reputasi destinasi dan memastikan keberhasilannya jangka panjang sebagai destinasi wisata utama (Jones & Wang, 2022).

Secara keseluruhan, perspektif operator pariwisata memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan mengelola operasi pariwisata di tengah merebaknya penipuan di Kuta Mandalika. Dengan memprioritaskan perilaku etis, transparansi, dan kolaborasi, operator berkontribusi pada pembentukan industri pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi baik wisatawan maupun komunitas lokal.

Perspektif Internasional Tentang Penipuan Dalam Pariwisata

FGD memberikan wawasan berharga tentang penipuan yang umum di Kuta Mandalika, kemudian memeriksa perspektif internasional menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang tren, taktik, dan respons yang umum terhadap penipuan dalam sektor pariwisata. Dengan membandingkan dan kontras pengalaman dari destinasi lain, kita dapat meraih pelajaran berharga dan mengidentifikasi praktik terbaik untuk mengatasi penipuan di Kuta Mandalika.

1) Analisis Komparatif

Contoh-contoh internasional tentang penipuan pariwisata, terutama yang umum di destinasi wisata populer seperti Thailand, memberikan wawasan berharga tentang modus operandi penipu dan dampaknya terhadap wisatawan dan ekonomi lokal. Di Thailand, misalnya, penipuan bervariasi dari inflasi harga dan pemalsuan barang/jasa hingga skema yang lebih canggih yang melibatkan produk palsu dan paket wisata yang menipu. Penipuan-penipuan ini mengeksploitasi kerentanan wisatawan, merusak kepercayaan, dan mencemarkan reputasi destinasi, menyoroti perlunya kerangka regulasi yang kuat dan langkah-langkah perlindungan konsumen (Hall & Page, 2021).

2) Pelajaran yang Dipetik

Mengambil pelajaran dari pengalaman internasional, beberapa pelajaran muncul yang dapat memberikan informasi bagi strategi untuk mengatasi penipuan dan meningkatkan perlindungan konsumen di Kuta Mandalika. Pertama, penegakan regulasi harus diperkuat untuk mencegah praktik penipuan dan mempertanggungjawabkan pelakunya. Kedua, kampanye kesadaran publik dan inisiatif pendidikan sangat penting untuk membekali wisatawan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan. Ketiga, kerjasama antara lembaga pemerintah, operator pariwisata, dan organisasi masyarakat sipil penting untuk mengkoordinasikan respons terhadap penipuan dan membentuk budaya integritas dan transparansi dalam industri pariwisata (Braun & Hernández, 2021).

Dengan menyintesis perspektif internasional dengan wawasan lokal, pemangku kepentingan di Kuta Mandalika dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh penipuan dan memanfaatkan praktik terbaik global untuk mengembangkan strategi yang disesuaikan untuk mengurangi risiko dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Melalui kerjasama lintas batas dan berbagi

pengetahuan, industri pariwisata di Kuta Mandalika dapat membangun ketahanan dan adaptabilitas di hadapan ancaman yang berkembang, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan daya saing destinasi di pasar pariwisata global.

Secara keseluruhan, perspektif internasional tentang penipuan dalam pariwisata berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi yang berharga bagi pemangku kepentingan di Kuta Mandalika, menawarkan wawasan berharga dan rekomendasi praktis untuk mengatasi isu yang meresap ini dan mempromosikan budaya kepercayaan dan integritas dalam industri pariwisata.

Keterlibatan Masyarakat Dan Pariwisata Berkelanjutan

Dalam konteks lanskap pariwisata Kuta Mandalika, keterlibatan masyarakat muncul sebagai komponen penting dalam mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan dan mengurangi dampak penipuan bagi wisatawan dan penduduk lokal. Dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengelola warisan budaya dan sumber daya alam mereka, para pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang ekonomis dan bertanggung jawab secara sosial (Jones & Wang, 2022).

1) Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pariwisata dan melestarikan identitas budaya Kuta Mandalika. Melalui inisiatif seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Pariwisata), anggota masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam manajemen pariwisata, tata kelola, dan proses pengambilan keputusan. Dengan membina rasa memiliki dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, komunitas menjadi mitra dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, berkontribusi pada pelestarian tradisi dan mata pencaharian mereka (“Global Best Practices in Tourism Resilience and Crisis Management,” 2023).

2) Peningkatan Kapasitas

Program peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pengusaha lokal dan penyedia layanan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang pariwisata di Kuta Mandalika. Dengan memberikan anggota masyarakat alat dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan pengalaman otentik, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan sambil menghasilkan dampak ekonomi positif bagi ekonomi lokal. Selain itu, inisiatif peningkatan kapasitas mempromosikan profesionalisme, integritas, dan perilaku etis di antara para pemangku kepentingan pariwisata, dengan demikian mengurangi risiko penipuan dan praktik penipuan (World Heritage and Sustainable Tourism: Lessons from the Asia-Pacific, 2022).

3) Kemitraan Kolaboratif

Kolaborasi antara masyarakat lokal, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan aktor sektor swasta sangat penting untuk mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan dan mengatasi akar penyebab penipuan. Melalui kemitraan kolaboratif, para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan keahlian kolektif, sumber daya, dan jaringan mereka untuk menerapkan solusi inovatif, seperti inisiatif pariwisata berbasis masyarakat, proyek pelestarian warisan budaya, dan kampanye pariwisata yang bertanggung jawab. Dengan bekerjasama, para pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang memberikan manfaat bagi wisatawan dan penduduk lokal, sambil menjaga aset alam dan budaya Kuta Mandalika untuk generasi mendatang (Regulations on Tourism Development in Kuta Mandalika, 2023).

Sebagai kesimpulan, keterlibatan masyarakat muncul sebagai landasan

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kuta Mandalika, menawarkan jalan menuju pertumbuhan inklusif, konservasi lingkungan, dan kesatuan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kapasitas mereka, dan mempromosikan kemitraan kolaboratif, para pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang tangguh, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan baik wisatawan maupun penduduk setempat.

Tantangan Dan Peluang

Penyelenggaraan praktik pariwisata yang berkelanjutan di Kuta Mandalika dihambat oleh sejumlah tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk inovasi, kolaborasi, dan perubahan positif. Dengan menghadapi tantangan ini secara langsung dan memanfaatkan peluang untuk perbaikan, para pemangku kepentingan dapat membuka jalan bagi industri pariwisata yang etis, tangguh, dan inklusif.

1) Hambatan bagi Kemajuan

Beberapa hambatan menghambat upaya untuk memerangi penipuan dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab di Kuta Mandalika. Ini termasuk penegakan peraturan yang tidak memadai, kurangnya transparansi dalam penetapan harga dan penyampaian layanan, infrastruktur yang tidak memadai, disparitas sosial-ekonomi, dan hambatan budaya. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang beragam melalui reformasi regulasi, inisiatif peningkatan kapasitas, kampanye kesadaran publik, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mengatasi kepentingan yang tertanam dan hambatan birokratis mungkin memerlukan advokasi yang berkelanjutan, kemauan politik, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Mbaiwa, 2022).

2) Peluang untuk Inovasi

Di tengah tantangan yang dihadapi oleh penipuan, ada peluang untuk inovasi dan kolaborasi yang dapat mendorong perubahan positif dalam industri pariwisata Kuta Mandalika. Misalnya, memanfaatkan solusi teknologi seperti blockchain dan otentikasi digital dapat meningkatkan transparansi dan jejak transaksi, mengurangi risiko penipuan dan kegiatan penipuan. Demikian pula, memfasilitasi kemitraan antara operator pariwisata, masyarakat lokal, dan institusi akademis dapat memicu inovasi dalam praktik pariwisata yang berkelanjutan, seperti inisiatif ramah lingkungan, proyek pelestarian warisan budaya, dan usaha pariwisata berbasis masyarakat. Dengan merangkul inovasi dan kolaborasi, para pemangku kepentingan dapat membuka jalan baru bagi pertumbuhan, diferensiasi, dan daya saing di pasar pariwisata global (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang yang terkait dengan memerangi penipuan dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab di Kuta Mandalika menegaskan perlunya tindakan bersama dan tanggung jawab bersama di antara para pemangku kepentingan. Dengan mengatasi hambatan sistemik, memfasilitasi inovasi, dan memupuk kemitraan kolaboratif, para pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang etis, tangguh, dan berkelanjutan, memastikan kemakmuran dan kesejahteraan jangka panjang bagi penduduk dan pengunjung Kuta Mandalika.

KESIMPULAN

Focus Group Discussion yang dilakukan di Kuta Mandalika telah memberikan wawasan berharga tentang prevalensi, dampak, dan respons terhadap penipuan dalam sektor pariwisata. Melalui pengalaman langsung dan sudut pandang yang dibagikan oleh beragam pemangku kepentingan, kita telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat multiaspek dari penipuan dan implikasinya terhadap integritas dan

keberlanjutan industri pariwisata Kuta Mandalika. Temuan utama dari diskusi tersebut menyoroti sifat merajalela dari penipuan, mulai dari peningkatan harga akomodasi dan barang/jasa yang salah diwakili hingga tantangan yang dihadapi oleh operator pariwisata dan otoritas regulasi. Meskipun demikian, ada peluang untuk inovasi, kolaborasi, dan perubahan positif, sebagaimana ditunjukkan oleh inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat penegakan regulasi, dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab.

Melangkah ke depan, sangat penting bagi para pemangku kepentingan di Kuta Mandalika untuk mengambil tindakan bersama untuk mengatasi akar penyebab penipuan dan mempromosikan perilaku etis dalam industri pariwisata. Hal ini memerlukan pendekatan yang beragam melalui reformasi regulasi, inisiatif peningkatan kapasitas, kampanye kesadaran publik, dan kemitraan kolaboratif. Dengan bekerjasama, para pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang tangguh, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan baik pengunjung maupun penduduk setempat. Sebagai kesimpulan, temuan dari FGD menekankan perlunya tindakan kolektif dan tanggung jawab bersama di antara para pemangku kepentingan untuk memerangi penipuan dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab di Kuta Mandalika. Dengan merangkul inovasi, kolaborasi, dan perilaku etis, kita dapat memastikan kemakmuran dan keberlanjutan jangka panjang dari industri pariwisata Kuta Mandalika, sambil melestarikan warisan alam dan budayanya untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2024). Scams in Tourism: Insights from Kuta Mandalika. Unpublished raw data.
- Braun, E., & Hernández, I. G. (2021). Community-Based Tourism Development: Lessons from Latin America. *Tourism Geographies*, 23(4), 652–670.
- Economic Impact of Scams in the Tourism Sector: Case Studies from Southeast Asia. (2024). International Monetary Fund (IMF). <https://www.imf.org/economic-impact-of-scams-in-tourism>
- Global Best Practices in Tourism Resilience and Crisis Management. (2023). In World Travel & Tourism Council (WTTC).
- Global Code of Ethics for Tourism. (2019). United Nations World Tourism Organization (UNWTO). <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2021). Tourism in Asia. In *The Routledge Handbook of Tourism*. Routledge.
- Jones, E., & Wang, L. (2022). Community Engagement in Sustainable Tourism Development: A Case Study of Kuta Mandalika. *Sustainable Tourism Review*, 5(1), 67-82.
- Mbaiwa, J. E. (2022). Scams in African Safari Tourism: Perspectives from Botswana. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(3), 415–430.
- Regulations on Tourism Development in Kuta Mandalika, Ministry of Tourism and Creative Economy (2023).
- Smith, J. (2023). Understanding Scams in the Tourism Industry: A Literature Review. *Journal of Tourism Research*, 10(2), 123–145.
- Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. (2019). United Nations (UN). <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Heritage and Sustainable Tourism: Lessons from the Asia-Pacific. (2022). UNESCO. <https://whc.unesco.org/world-heritage-and-sustainable-tourism-lessons-from-the-asia-pacific>